



Published every June and December

JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)

ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>



Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Politik Penganggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah

Indah Purnama Sari¹. Memen Kustiawan¹.

Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Indonesia.

Abstract. *This research has purpose to know how The Public Participation, Political Budgeting, and The Priority and Plafond of Budget (PPA) influence on Preparation of Region Budget Expenditure. The population of this research were all working units (SKPD) which form departments, agencies, offices, parts and districts, its about 51 samples was obtained by saturation sampling method. Collected data with disseminated of questionnaire which is using likert scale. For test the hypohthesis used multiple regression. The final results of this research are : first, the public participation is influence positive to preparation of region budget expenditure at Batam City. Second, Political Budgeting is influence negative to preparation of region budget expenditure at Batam City. Third, priority and plafond of budget is influence positive to preparation of region budget expenditure at Batam City. And fourth, simultaneously public participation, budget politics and priority plafond of budget are influence about 87,40% to the preparation of region budget expenditure, while the rest 12,60% influenced by another factor outside of the three variables.*

Keywords: *society participation; politics of budgeting; budget ceiling priority (ppa); regional budget;*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Partisipasi Masyarakat, Politik Penganggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Kota Batam. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kota Batam yang berbentuk dinas, badan, bagian, kantor dan kecamatan yaitu sebanyak 51 sampel yang diperoleh dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala *likert*. Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis regresi berganda. Hasil akhir dari penelitian ini adalah : pertama, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam. Kedua, politik penganggaran berpengaruh negatif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah Kota Batam. Ketiga, prioritas plafon anggaran berpengaruh positif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah Kota Batam. Dan keempat secara simultan partisipasi masyarakat, politik penganggaran dan prioritas plafon anggaran memberikan pengaruh sebesar 87,40% terhadap penyusunan anggaran belanja daerah Kota Batam, sedangkan sisanya sebesar 12,60% dipengaruhi oleh faktor lain di luar ketiga variabel tersebut.

Kata Kunci: *public participations; budget politics; priority plafond of budget; preparation of region budget expenditure.*

Corresponding author. Jl. Dr. Setiabudi No 229 Kota Bandung 40154. Email.¹ indahpurnama0891@gmail.com
² Memen.kustiawan@upi.edu

How to cite this article. Indah & Memen (2013). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Politik Penganggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 5(1), 1–10.

History of article. Received: Januari 2014, Revision: Maret 2014, Published: Juni 2014

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia mulai dilaksanakan sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Namun aplikasi undang-undang ini belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Seiring reformasi penyelenggaraan pemerintahan diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya Undang-Undang tersebut mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berimplikasi pada tuntutan tersebut maka pelaksanaan pemerintahan daerah mengalami perubahan yang ditandai dengan dua perubahan mendasar yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerahnya secara

mandiri dengan tetap berlandaskan kepada prioritas nasional.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan, akan selalu melibatkan beberapa tahapan penganggaran. Tahapan-tahapan dalam penganggaran meliputi penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi. Pada proses penganggaran ini partisipasi dari masyarakat merupakan salah satu prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dipenuhi yang mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan hasil dari *Open Budget Survey* (OBS) Tahun 2012, Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki pengawasan anggaran yang kuat namun lemah dalam keterlibatan publik dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara. Untuk temuan OBS terkait partisipasi publik Indonesia berdasarkan indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Partisipasi Publik di Indonesia

No.	Kebutuhan (Indikator)	Temuan
1.	Proses sebelum terjadinya konsultasi Publik	
	Syarat formal untuk partisipasi publik	Tidak Ada
	Penyampaian tujuan dalam partisipasi publik	Tidak Ada
2.	Komunikasi lembaga audit (BPK) selain publikasi laporan hasil audit	Ada dan Kuat
	Proses Konsultasi Publik	
	Mekanisme yang dikembangkan eksekutif untuk partisipasi dalam perencanaan	Tidak Ada
	Dengar partisipasi di legislatif mengenai kerangka ekonomi makro	Tidak Ada
	Dengar pendapat di legislatif mengenai masing-masing lembaga	Ada tapi lemah
	Kesempatan publik di legislatif untuk berpendapat selama dengar pendapat anggaran	Ada tapi lemah
	Mekanisme yang dikembangkan oleh eksekutif untuk partisipasi selama pelaksanaan anggaran	Tidak Ada
3.	Pengembangan mekanisme oleh BPK untuk partisipasi dalam agenda audit	Ada tapi lemah
	Proses setelah Konsultasi Publik	

No.	Kebutuhan (Indikator)	Temuan
	Tanggapan oleh eksekutif mengenai masukan yang diberikan oleh publik	Tidak Ada
	Laporan yang dikeluarkan legislatif pada rapat dengar pendapat anggaran	Ada tapi lemah
	Tanggapan oleh BPK mengenai masukan yang diberikan oleh publik	Tidak ada

Sumber : *Open Budget Survey 2012*

Mengacu pada tabel tersebut bahwa keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran di Indonesia masih terbatas, dilihat dari beberapa indikator yang menunjukkan lemahnya atau tidak adanya partisipasi. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sopanah (2009), bahwa partisipasi masyarakat masih secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004. Berkaitan dengan implementasi partisipasi masyarakat kaitannya dengan proses partisipasi dianggap semu, yang mana hasilnya kurang lebih hanya 25-40% usulan masyarakat akan didanai oleh APBD.

Selain peran aktif dari masyarakat, peran pihak eksekutif maupun legislatif dalam penyusunan anggaran sangat penting, dimana pihak eksekutif menyusun rencana anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan rencana belanja tiap-tiap dinas atau departemen yang ada sedangkan legislatif menyusun rencana anggaran dewan yang kemudian akan digabungkan dengan anggaran pemerintah daerah dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. Pada tahap perencanaan tersebut, keterlibatan rakyat amat

penting untuk menjangkau aspirasi. Namun mekanisme penyusunan penganggaran ini melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang dan kepentingan yang dibawa, hal ini memungkinkan terjadinya politik penganggaran yang tidak sesuai.

Politik penganggaran merupakan proses yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif untuk menentukan arah alokasi anggaran. Namun hasil penelitian Arniati, dkk (2010) menyatakan bahwa dalam penyusunan anggaran di Kota Tanjungpinang, politik penganggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Bila dilihat dari trend belanja daerah secara nasional pada tahun anggaran 2009-2012, persentase alokasi anggaran didominasi oleh belanja pegawai yang cenderung fluktuatif. Namun bila dilihat secara nominal belanja pegawai konsisten mengalami peningkatan tiap tahunnya yaitu sekitar 13% dari tahun sebelumnya. Untuk belanja modal pada belanja daerah secara nasional belum memenuhi Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 untuk jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Trend Belanja Daerah TA 2009-2012 (dalam persen)

No.	Jenis Belanja	2009	2010	2011	2012
1	Belanja Pegawai	43,46	46,52	46,25	44,12
2	Belanja Barang dan Jasa	19,17	19,21	21,04	20,65
3	Belanja Modal	27,60	22,53	22,92	23,22

No.	Jenis Belanja	2009	2010	2011	2012
4	Belanja Lain-lain	9,78	11,74	9,78	12,01

Sumber : Data APBD Konsolidasi 2009-2012 (diolah)

Penyusunan anggaran tidak hanya semata-mata berdasarkan usulan anggaran dari pihak penyusun anggaran ataupun anggaran tahun sebelumnya, terdapat mekanisme yang mengatur penyusunan anggaran tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 bahwa, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan sasaran utama yang ditetapkan sebagai 11 Prioritas Nasional dan tiga Prioritas lainnya yaitu: reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup dan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik; kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi dan tiga prioritas lainnya (bidang politik, hukum, dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat).

Dalam pelaksanaannya masih dapat ditemukan pada beberapa daerah yang anggarannya belum memenuhi prioritas nasional. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyanto (2012) di Jawa

Tengah menyatakan bahwa “Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010 belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)”.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dan fenomena yang telah disampaikan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian terkait partisipasi masyarakat, politik penganggaran serta prioritas plafon anggaran dalam proses penyusunan anggaran belanja daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hal-hal yang mempengaruhi penyusunan anggaran belanja daerah. Pada penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah Pemerintah Kota Batam, dalam hal penyusunan anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Batam sudah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk belanja langsung yaitu sebesar 58,54% dari total belanja APBD, sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar 41,46% dari total APBD. Dan untuk rincian alokasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Rincian Alokasi Belanja Daerah TA 2012 Kota Batam (dalam persen)

No.	Komponen	APBD	APBD-P	(+/-)
1	Belanja Pegawai	50,94	50,98	4,78
2	Belanja Barang dan Jasa	30,00	28,30	-1,25
3	Belanja Modal	16,99	18,55	14,30
4	Belanja Lain-lain	2,08	2,17	9,52

Sumber : Ringkasan Perubahan APBD 2012 Pemkot Batam (diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa belanja daerah Kota Batam didominasi oleh belanja pegawai dengan persentase rata-rata diatas 50%, bobot tersebut masih jauh dari bobot yang ideal untuk belanja pegawai berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan

Agus D.W. Martoearjojo untuk mendapatkan kualitas APBD yang lebih baik, biaya pegawai pada APBD diharapkan tidak lebih dari 40%. Untuk belanja barang dan jasa mengalami penurunan bobot setelah mengalami perubahan sedangkan untuk

belanja modal memperoleh persentasi di bawah 29% baik setelah maupun sebelum perubahan, sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 untuk jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah.

Menanggapi alokasi anggaran belanja daerah Kota Batam, Sunarto Wage Jamarin Dosen dan Kepala LPPM Univeritas Putra Batam (dalam www.haluankepri.com), secara ringkas disimpulkan bahwa APBD Kota Batam tahun 2012 belum pro rakyat karena presentasi alokasi belanja yang besar untuk belanja pegawai padahal jumlah pegawai Kota Batam tidak banyak. Namun, alokasi belanja yang bersentuhan langsung dengan pembangunan warga Kota Batam yang cukup banyak dianggarkan sekitar 58% dari APBD. Bila dilihat dari pengalaman sebelumnya, apabila pendapatan tidak sesuai rencana maka yang dikorbankan adalah belanja langsung, sedangkan belanja pegawai tetap dijalankan dengan dalih telah dianggarkan dalam APBD. Namun dalam pelaksanaannya meskipun komposisi belanja langsung sebesar 58% dalam realisasinya tidak terpenuhi karena banyak yang dibatalkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan persetujuan DPRD Kota Batam dengan dalih terjadi defisit.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, POLITIK PENGANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH (Survei pada SKPD Kota Batam)”**.

1.1 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam ?
- b. Bagaimana pengaruh politik penganggaran terhadap penyusunan

anggaran belanja daerah di Kota Batam ?

- c. Bagaimana pengaruh prioritas plafon anggaran terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam ?
- d. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat, politik penganggaran dan prioritas plafon anggaran secara simultan terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui pengaruh politik penganggaran terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam.
- c. Untuk mengetahui pengaruh prioritas plafon anggaran terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam.
- d. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, politik penganggaran dan prioritas plafon anggaran secara simultan terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam.

KAJIAN LITERATUR

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak di luar pemerintah daerah (*state*) dan DPRD dalam menyusun/membentuk Raperda atau Perda”. Hal tersebut sejalan dengan hakekat otonomi daerah yang berupa kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Muhlis Madani, 2011)

Politik Penganggaran

Politik anggaran adalah unsur utama dalam politik ekonomi pemerintah dan instrumen

kebijakan penting bagi negara. Hal tersebut merupakan faktor yang paling berpengaruh pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya parlemen memiliki kewenangan untuk ikut membahas masalah anggaran negara ini. Prioritisasi anggaran, harus menjadi konsekuensi politik anggaran, dan politik anggaran harus senantiasa berlandaskan konstitusi dan gagasan dasar yang melahirkan Indonesia. (Ginandjar Kartasmitta Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (dalam Krisman Purwoko,2010)

Prioritas Plafon Anggaran (PPA)

Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD (Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah)

Penyusunan Anggaran Belanja Daerah

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai dengan siklus anggaran dan merupakan suatu kegiatan yang menyeluruh dan terpadu'. Untuk kelancaran dan kemandirian proses tersebut sesuai dengan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing aparat pemerintah di daerah, hendaknya disusun suatu jaringan kegiatan sebagai pedoman bagi segenap aparatur pemerintah di daerah dalam menyusun APBD (Ibnu Syamsi dalam Rahardjo Adisasmita, 2011)

Hipotesis

H1 = Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam

H2 = Politik penganggaran berpengaruh negatif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam

H3 = Prioritas dan Plafon Anggaran berpengaruh positif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam

H4 = Partisipasi masyarakat, politik penganggaran dan prioritas plafon anggaran

secara simultan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini berupa penelitian kuantitatif, yang mana pada metode penelitian ini umumnya melibatkan proses pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, serta penulisan hasil penelitian. "Dalam penelitian kuantitatif masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, berbeda dengan penelitian kualitatif yang mana masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan" (Sugiyono,2010:31).

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Yang menjadi populasi serta sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam yang terdiri dari badan, dinas, bagian, kantor dan kecamatan yang berjumlah 51 sampel. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden, adapun responden dalam penelitian ini yaitu untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X_1) adalah pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat dan untuk variabel Politik Penganggaran (X_2), Prioritas Plafon Anggaran (X_3) serta Penyusunan Anggaran Belanja Daerah (Y) adalah Kepala Bagian Perencanaan/Program setiap SKPD Kota Batam.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dimana sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas, transformasi data dengan menggunakan *Method Successive Interval* (MSI) dan Uji Asumsi Klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Kota Batam

Pengaruh dari partisipasi masyarakat terhadap penyusunan anggaran belanja daerah

di Kota Batam dalam penelitian ini dapat diketahui melalui perhitungan statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda, dimana hasil perhitungan tersebut menghasilkan nilai koefisien regresi (b_1) sebesar 0,328. Oleh karena nilai koefisien regresi yang diperoleh lebih besar dari 0 dan bernilai positif ($0,328 > 0$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah Kota Batam.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan pernyataan Hesti *et.al* (2006:20) bahwa salah satu peran rakyat dalam anggaran adalah hak, sebagai hak karena anggaran berasal dari uang rakyat sehingga rakyat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang mereka inginkan. Program penyusunan anggaran yang partisipatif berusaha menghubungkan pembuat kebijakan dan adanya keterlibatan partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Ari Hidayat (2011) yang menyatakan bahwa “di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran dalam keseluruhan siklus anggaran. Asumsinya adalah partisipasi rakyat dan transparansi yang dilakukan dalam siklus anggaran akan memperkuat pengawasan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.”

Pengaruh Politik Penganggaran Terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Kota Batam

Pengaruh dari politik penganggaran terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam dalam penelitian ini dapat diketahui melalui perhitungan statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda, dimana hasil perhitungan tersebut menghasilkan nilai koefisien regresi (b_2) sebesar -0,66. Oleh karena nilai koefisien regresi yang diperoleh lebih kecil dari 0 dan

bernilai negatif ($-0,66 < 0$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik penganggaran berpengaruh negatif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah Kota Batam.

Hal ini disebabkan pengetahuan instansi dalam menentukan prioritas anggaran yang sesuai dengan kebutuhan publik yang belum maksimal dan penyusunan anggaran belanja daerah ini dirasakan masih adanya ketimpangan kepada kepentingan politik praktis. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhlis Madani (2011:9) bahwa proses tawar menawar (*bargaining*) yang terjadi di antara aktor-aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan dilaksanakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat namun digunakan untuk meraih kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) itu sendiri. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Ginandjar (dalam Krisman Purwoko, 2010) bahwa gagasan dari konstitusi yang asli tetap harus menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan ekonomi ini. Jika tidak ada landasan yang jelas untuk penentuan politik anggaran, maka yang terjadi adalah rebutan alokasi anggaran tanpa dasar dan arah yang jelas. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arniati, dkk (2010) politik penganggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Pengaruh Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Kota Batam

Pengaruh dari prioritas dan plafon anggaran terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam dalam penelitian ini dapat diketahui melalui perhitungan statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda, dimana hasil perhitungan tersebut menghasilkan nilai koefisien regresi (b_3) sebesar 1,742. Oleh

karena nilai koefisien regresi yang diperoleh lebih besar dari 0 dan bernilai positif ($1,742 > 0$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prioritas plafon anggaran memiliki pengaruh positif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah Kota Batam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rahardjo Adisasmita (2011:59) bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan anggaran adalah penetapan prioritas kegiatan pembangunan. Dengan skala prioritas maka pemerintah akan mampu dengan tepat menentukan pembangunan yang mana yang lebih penting. Dari segenap aspirasi/masukan program pembangunan yang banyak, maka dengan skala prioritas yang ada dapat menyeleksi, menentukan bahwa sesuatu program adalah yang terbaik dari sekian banyak program yang diusulkan.

Pengaruh dari Prioritas Plafon Anggaran ini sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013 bahwa dalam penyusunan anggaran di daerah harus dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas-prioritas nasional agar tidak terjadi perbedaan arah dan tujuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Politik Penganggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Secara Simultan Terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Kota Batam

Berdasarkan dari hasil analisis regresi berganda secara simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 114,243 dimana nilai tersebut lebih besar dibanding nilai F_{tabel} 3,195 ($114,243 > 3,195$) maka dapat diambil kesimpulan Partisipasi Masyarakat, Politik Simpulan dari penelitian ini yaitu Penganggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) secara simultan berpengaruh terhadap

Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Kota Batam.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rahardjo Adisasmita (2011:58) yang menyatakan bahwa pembangunan memiliki berbagai sektor yang dalam pandangan masyarakat dengan tingkat wawasan berfikir yang terbatas menganggap semua bentuk pembangunan tersebut sama, sehingga akan melahirkan heterogenitas kebutuhan yang akan disampaikan oleh para masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai wadah yang menampung setiap aspirasi yang disampaikan oleh segenap lapisan masyarakat harus memiliki preferensi terarah dan terukur dalam menentukan sektor-sektor yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Preferensi terarah dan terukur ini tercakup dalam apa yang disebut skala prioritas. Skala prioritas inilah yang kemudian akan menentukan arah penyusunan anggaran belanja daerah. Dalam tahapan tersebut dituntut adanya komitmen untuk tetap mempertahankan arah anggaran yang sesuai prioritas pembangunan dan apa yang menjadi kebutuhan publik.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Mardiasmo (2004:65) bahwa “salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat politik (*political tool*) dimana anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut”. Oleh karena itu, dalam politik penganggaran prioritasasi anggaran harus menjadi konsekuensi dan politik anggaran harus senantiasa berlandaskan konstitusi dan gagasan dasar yang melahirkan Indonesia.

SIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam.
2. Politik penganggaran secara parsial berpengaruh negatif terhadap penyusunan

anggaran belanja daerah di Kota Batam. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan dalam menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan publik.

3. Prioritas Plafon Anggaran (PPA) secara parsial berpengaruh positif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam.
4. Partisipasi masyarakat, politik penganggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) secara simultan berpengaruh positif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam.

Saran

1. Pemerintah Kota Batam diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan peran serta dari masyarakat dalam proses penganggaran daerah khususnya penyusunan anggaran belanja, serta Pemerintah Daerah diharapkan kedepan dalam penyusunan program daerah dapat meningkatkan perhatiannya terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Dalam penyusunan anggaran daerah diharapkan dari pihak instansi pemerintah daerah Kota Batam dapat meningkatkan pengetahuannya dalam melakukan politik penganggaran/tawar menawar yang berlandaskan pada prioritas nasional dan kebutuhan publik.
3. Pemerintah Kota Batam diharapkan dapat terus memperhatikan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sebagai pedoman dalam menentukan arah penyusunan anggaran belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Riyanto. (2012). "Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010". *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*. 12.

Arif Hidayat. (2011). "Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia

Pasca Reformasi". *Pandecta, Volume 6. Nomor 1 Januari 2011*.

- Deddi N dan Ayuningtyas H. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta:Salemba Empat.
- Edstrom Judith dan Hoff, R.V.D. (2009). *Kajian Akademis Reformasi Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Manajemen Pelayanan Publik*. Local Governance Support Program.
- Erwan, A.P. dan Dyah, R.S. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Gava Media:Yogyakarta
- Henry Faizal Noor. (2013). *Ekonomi Publik, Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*. Akademia Permata:Jakarta.
- Hesti Puspitosari et al. (2006). *Marginalisasi Rakyat Dalam Anggaran Publik-Partisipasi Rakyat Dalam Menyusun Anggaran Publik di Daerah*. YAPPIKA: Jakarta.
- Husein, Umar. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta
- Krisler, B.O. dan Icuik, R.B. (2006). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information (JRI) terhadap Informasi Asimetris (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri di Kota Purwokerto Jawa Tengah)*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang K-AMEN 09.
- Krisman Purwoko. (2010). Ginandjar: Pembahasan RAPBN-P 2010 Momentum Pelurusan Politik Anggaran. [Online]. Tersedia: <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/04/06/109564-ginandjar-pembahasan-rapbn-p-2010-momentum-pelurusan-politik-anggaran> [17 Maret 2013]
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:ANDI
- Moh. Pabundu Tika. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Bumi Aksara:Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
- Rahardjo Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Sopannah (2009). Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD
- Sopannah (2012). Ceremonial Budgeting Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah : Sebuah Keindahan yang Menipu
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta:Bandung
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta:Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Sunarto, W.S.J. (2012). Menakar APBD Kota Batam 2012. [Online]. Tersedia: <http://www.haluankepri.com/opini-/23514-menakar-apbd-kota-batam-2012.html> [27 Mei 2013]
- Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
- Surya, M.N. (2013). Kebijakan Politik Anggaran Pro Rakyat. [Online]. Tersedia: <http://www.batampos.co.id/27/05/2013/kebijakan-politik-anggaran-pro-rakyat> [27 mei 2013]
- Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah